

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Belanja Modal, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2011 sampai dengan 2015. Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama periode penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda yang diolah dengan software IBM SPSS 21 dan *Microsoft Excel* 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian secara parsial Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan tingkat signifikan untuk variabel Belanja Modal sebesar 0,962 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Hasil penelitian secara parsial Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan tingkat signifikan untuk variabel Pajak Daerah sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- c. Hasil penelitian secara parsial Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian Keuangan Daerah.

- d. Melalui uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,891 atau sebesar 89,1 %. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa 89,1% variabel Kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Modal, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya 10,9 % dijelaskan oleh variabel independen lain yang bukan variabel independen seperti Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Belanja Pegawai dan Dana Alokasi Khusus

## V.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan menambah jumlah variabel bebas sehingga akan lebih menguatkan penelitian yang diduga dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah disarankan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah yaitu berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang saya teliti. Sebab masih banyak Pemerintah Daerah yang Kemandirian Keuangan Daerahnya rendah karena sangat tergantung oleh dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.